



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
**UNIT KERJA** : DEWAN PENGAWAS

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUMPENO**
2. Jabatan : **ANGGOTA DEWAN PENGAWAS**
3. NHK : **17328**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **3.439.252.100**

1. Tanah Seluas 355 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 25.560.000
2. Tanah Seluas 367 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 264.240.000
3. Tanah Seluas 1.140 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI  
Rp. 117.152.100
4. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.347.300.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 237.000.000
6. Tanah Seluas 424 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI  
Rp. 848.000.000
7. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI  
Rp. 600.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **1.089.750.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.  
200.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
425.000.000



3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
464.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	407.032.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.591.316.828
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	15.527.350.928
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.527.350.928

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.